

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM INVESTASI PENDIDIKAN

* Ariyanto Ariyanto¹, Yulita Setiawati²

MAS Khulafaur Rasyidin¹, SMP N 13 Pontianak²

Email: ariyantokemenagkota@gmail.com¹, yulita733@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study is to describe economic development in education investment. Economic development is an effort to create changes in values and increase income per capita and groups. Per capita income will change if education is invested thoroughly and appropriately. This study uses a qualitative research approach by applying the method of literacy studies or literature review. The data analysis process applies the Miles and Huberman model, namely the data processing is carried out sequentially starting with data reduction, data exposure, and verification. This study has data sources that come from documentation, namely written or printed sources according to the topic sourced from books, journals, and websites. The results of this study indicate that economic development has a very important role in investment in education which is managed by the government because both have similar goals.

Keywords: Economic Development, Education Investment

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk medeskripsikan pembangunan ekonomi dalam investasi pendidikan. Pembangunan ekonomi merupakan upaya menciptakan perubahan pada nilai-nilai dan naiknya pendapatan perkapita maupun kelompok. Pendapatan perkapita akan mengalami perubahan jika dilakukan investasi pendidikan secara menyeluruh dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menerapkan metode studi literasi ataupun kajian pustaka. Proses analisis data mengaplikasikan model Miles dan Huberman, yaitu olah data dilaksanakan berurutan yang dimulai dengan reduksi data, pemaparan data, melakukan verifikasi. Penelitian ini memiliki sumber data yang berasal dari hasil dokumentasi, yaitu sumber tertulis atau tercetak sesuai dengan topik yang bersumber dari buku, jurnal, dan website. Adapun hasil penelitian ini bahwa pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam investasi di bidang pendidikan yang dikelola oleh pemerintah karena keduanya memiliki tujuan yang sejalan.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Investasi Pendidikan

A. Pendahuluan

Hakikat pembangunan adalah membangun seluruh elemen masyarakat suatu bangsa secara totalitas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Agar dapat membangun dengan baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral yang baik. Pembangunan adalah rentetan usaha yang dilakukan secara sadar untuk perbaikan taraf kehidupan. Perbaikan taraf kehidupan yang lebih baik sangat didambakan oleh semua masyarakat. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi, sangat diharapkan terus meningkat dan berlangsung melalui proses yang direncanakan.

Pelaksanaan pembangunan harus memandang semua sektor kehidupan, tidak hanya pada persoalan fisik semata. Pembangunan sesungguhnya merupakan perspektif pertumbuhan kemajuan sebuah negara. Kemajuan sebuah negara terlihat dari keberhasilan dalam pembangunan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk itu, pembangunan itu harus adil, yaitu adil bagi manusia (termasuk bagi generasi mendatang) dan adil bagi alam, yang kelestariannya perlu dipelihara (Wakhid, 2016, p.47). Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang megedepankan nilai-nilai, bersifat transendental, meta-disiplin, dan mental ideologi (*the ideology of developmentalisme*). Oleh karenanya, para pembuat kebijakan, pembuat perencanaan pembangunan, serta para ahli pembangunan selalu dihadapkan dengan persoalan nilai (*value choice*). Persoalan nilai dalam pembangunan akan membawa dampak tercapainya tujuan utama pembangunan itu sendiri.

Tujuan utama pembangunan terkonsentrasi pada cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan membutuhkan proses dan tahapan yang dapat diukur. Tahapan tersebut harus mampu menyentuh pada tiga bidang, yakni; *pertama*, bidang pembangunan sebagai tolok ukur kemakmuran materiil. *Kedua*, meningkatnya bidang kesejahteraan sosial. *Ketiga*, terwujudnya bidang keadilan sosial. Pembangunan sebuah negara sangat berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat terlihat adanya perubahan yang mendasar dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan penduduk sebuah negara yang mengalami peningkatan atau keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan perkapita, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara, dan distribusi pendapatan penduduknya. Menurut Dariah (2004, p.124) pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkenaan dengan kenaikan nilai nyata jumlah keseluruhan produksi barang dan jasa yang dapat terjadi jika tersedia Sumber Daya Alam (*natural capital*), modal karya manusia (*human made capital*), Sumber Daya Manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*) yang memadai secara kuantitas maupun kualitas.

Pembangunan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, demikian juga sebaliknya, karena pertumbuhan ekonomi memfasilitasi proses pembangunan ekonomi. Salah satu ukuran keberhasilan proses pembangunan di sebuah negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi tingkat kesiapan atau kesejahteraan hidup masyarakat.

Pendidikan memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, demikian juga sebaliknya, harus diakui bahwa keduanya memiliki peran yang sama penting. Menurut Burhanuddin (2013) bahwa pendidikan memiliki kontribusi atau sumbangsih terhadap pembangunan ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak selalu dipandang sebagai konsumsi atau pendanaan biasa. Sudah saatnya melihat pendidikan sebagai investasi yang akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju serta meningkatkan para warganya untuk mengembangkan diri yang berkenaan dengan aspek jasmani atau rohani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan terutama pembangunan yang terkait manusia (Simanjuntak, 2017, p.310).

Pembangunan merupakan investasi untuk masa depan manusia dan dapat dianggap sebagai modal yang setara dengan modal investasi dalam bentuk infrastruktur seperti gedung, jalan, dan jembatan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahat & Idrus (2016) investasi modal manusia dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi setiap individu dalam meningkatkan kompetensi dan memberikan fungsi dengan maksimum bagi pembangunan ekonomi melalui pendidikan yang berkesinambungan, keterampilan kerja, perbaikan kesehatan, dan komponen lainnya yang sejenis. Demikian juga menurut penelitian Marshall, Hine, and East (2017) menyatakan bahwa pendidikan dapat membentuk dorongan dari dalam setiap individu untuk melakukan perilaku pro lingkungan hidup (*pro-environmental behaviours*).

Pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan tuntutan zaman yang serba modern. Berdasarkan hasil penelitian Perkasa (2017) bahwa agar dapat meningkatkan daya saing negara melalui investasi di bidang pendidikan sangat diperlukan sebuah kebijakan yang mampu menghasilkan sumber daya yang memiliki daya saing, yakni 1) Revitalisasi program pendidikan dasar, 2) Program pendidikan menengah universal, 3) Revitalisasi pendidikan kejuruan, 4) Membangun pendidikan tinggi berkelas dunia, 5) Pengelolaan guru dalam era otonomi pendidikan, 6) Sertifikasi pendidik, 7) Arah pembinaan sekolah unggul dimasa depan. Agar keinginan tersebut dapat tercapai, sudah saatnya pemerintah memprioritaskan investasi pendidikan guna mewujudkan konsep pendidikan modern dan terarah yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan serta situasi atau kondisi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembangunan ekonomi dalam investasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah? Pembangunan ekonomi yang baik tentu akan berdampak dalam perubahan pandangan investasi dalam bidang pendidikan. Melalui investasi dalam bidang pendidikan tentu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka waktu yang panjang guna perbaikan taraf hidup secara individual maupun secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini, yakni; 1) untuk mendeskripsikan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah; 2) mendeskripsikan investasi pendidikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Manfaat penulisan penelitian ini adalah untuk; 1) menambah wawasan dan informasi tentang pembangunan ekonomi dalam investasi pendidikan, 2) sebagai referensi dalam penulisan penelitian selanjutnya, 3) memberikan informasi yang jelas tentang pembangunan ekonomi dalam investasi pendidikan yang dilakukan pemerintah. Sangat penting sebuah negara melakukan strategi dalam pembangunan ekonomi untuk investasi pendidikan agar taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dengan nilai moral berdasarkan Pancasila. Investasi pendidikan akan berhasil jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pembangunan ekonomi dalam investasi pendidikan terlihat dalam pengusulan anggaran sebesar 20 persen dari APBN dan disahkan oleh DPR untuk realisasi anggaran 2022.

B. Metode

Hasil penelitian tentu harus dapat membuktikan kevalidan isi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan sebuah metode ataupun pendekatan. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dan untuk mendeskripsikan hasil temuan terkait pertanyaan masalah penelitian digunakan metode studi literasi atau kajian pustaka. Metode studi literasi atau kajian pustaka adalah cara mengorganisasikan informasi berdasarkan hasil dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik pengumpul data berupa hasil dokumentasi, yaitu menemukan informasi sumber tertulis yang sesuai dengan kajian dalam penelitian. Pembacaan buku, jurnal, dan *website* merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

Pemrosesan analisis data penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu; *Pertama*, mempelajari data atau informasi tentang peran pembangunan ekonomi dalam investasi pendidikan. *Kedua*, memilah data primer yang bersumber dari buku, jurnal, dan *website*. *Ketiga*, melakukan proses olah data. *Keempat*, melakukan analisis data. Semua data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam tiga tahap pengolahan data yang dilakukan dengan urutan pengelompokan data, memilah data, dan membuat atau penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014, p. 8). Agar tidak terjadi kesalahan dalam proses menganalisis data, maka peneliti melakukan pengecekan serta pembacaan ulang literatur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Realisasi Investasi Bidang Pendidikan

Pendanaan pendidikan di sebuah negara harus dirancang sedemikian rupa agar investasi di bidang pendidikan tepat sasaran. Tanggung jawab pendanaan pendidikan secara struktural di Indonesia adalah mutlak dibawah kewenangan pemerintah dan masyarakat sebagai *stakeholder*. Menurut PP 48 thn 2008, Bab 1, pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat secara bersama-sama. Besaran anggaran pendidikan di Indonesia tergolong sudah sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. UU No. 20 thn 2003, pasal 49, ayat 1, menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan

dialokasikan minimum 20 persen dari APBN dan APBD, selain gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan.

Rancangan anggaran untuk bidang pendidikan pada RAPBN tahun 2022 diusulkan sebesar Rp541,7 triliun atau mengalami sedikit kenaikan dibanding realisasi anggaran dalam APBN 2021 sebesar Rp540 triliun dari yang direncanakan sebesar Rp550 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk meneruskan reformasi pendidikan dengan *stressing* pada tiga bidang, yakni; 1) peningkatan mutu SDM melalui penguatan program Pendidikan Anak Usia Dunia dan program sekolah penggerak; 2) pemerataan sarana dan prasarana pendidikan; 3) menyelesaikan *mismatch* dengan penguatan program pendidikan vokasi. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan pendidikan vokasi yang diarahkan untuk inovasi dan pengembangan riset terapan yang terkoneksi dengan masyarakat dan dunia industri, program magang dan pengajaran industri, serta implimentasi program merdeka belajar (Widodo, 2021).

Anggaran yang diinvestasikan oleh pemerintah di bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN bertujuan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan SDM tidak akan dapat berlangsung dengan baik apabila tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam investasi pendidikan. Dengan melakukan investasi pada bidang pendidikan tentu akan berdampak pada perubahan taraf kehidupan dan juga penghasilan bagi setiap orang dan juga kelompok. Pendidikan sebagai investasi merupakan suatu bentuk modal yang sangat mempengaruhi tingkat produktivitas individu ataupun kelompok, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan (earnings) individu dan mampu memberikan sumbangsih percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara nasional (Machali dan Ara Hidayat, 2015, p.557-558).

Menurut Widodo (2021) Indonesia harus dapat mengambil manfaat bonus demografi dan siap menyongsong disrupsi teknologi. Hal ini berarti Indonesia harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global, produktif, inovatif, dengan tetap mengamalkan dan mengutamakan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan senantiasa menjaga jati diri budaya bangsa. Penetapan 20 persen dari APABN atau anggaran sebesar Rp 541,7 triliun di tahun 2022 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat investasi jangka panjang di bidang pendidikan. Investasi pendidikan tersebut diperuntukkan untuk mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

2. Investasi Pendidikan Jangka Panjang

Investasi dapat didefenisikan sebagai pembelian dan produksi barang modal yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan dalam produksi masa depan (Domino, 2018, p.79). Hal ini menjadikan banyak orang melakukan investasi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimum dan terciptanya kesejahteraan atau kemakmuran secara ekonomi.

Berinvestasi dalam bidang pendidikan memang keuntungannya tidak dapat dinikmati secara langsung, karena memerlukan proses yang membutuhkan kesabaran dan keuletan

sehingga mampu menciptakan anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai etika, moral, tanggung jawab, keadilan, jujur, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban yang semua itu merupakan indikator manusia yang lebih baik, berkualitas, dan bermutu (Suryadi, 2014, p.96). Selain itu, seseorang akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengembangan kepribadian, pemuasan kebutuhan sosial sehingga menjanjikan kehidupan yang terbaik di masa yang akan datang (Irianto (2011, p.54). Investasi pendidikan lebih mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Sumber daya manusia Indonesia saat ini masih terbilang sangat lemah dalam mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Salah satu penyebab utama dikarenakan pemerintah selama ini belum terlalu serius menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan. Pembangunan pendidikan yang selama ini berjalan lebih kepada memberikan atau mengakomodir kepentingan politik dari pada untuk kemajuan pendidikan.

Kurangnya pemerataan dalam pemberlakuan kebijakan pendidikan juga menjadi penyebab tersendatnya kemajuan investasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang paling urgen adalah ditetapkannya batas minimum realisasi APBN maupaun APBD sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan. Ditetapkannya anggaran 20 persen untuk pembangunan bidang pendidikan sebenarnya merupakan langkah awal pemerintah melakukan investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fahmi (2015, p.4-5) investasi adalah penempatan sejumlah dana untuk membiayai sumber-sumber tertentu pada masa sekarang dengan tujuan mendapat keuntungan sekarang ataupun pada masa akan datang. Manfaat dari investasi jangka panjang dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a) Fungsi Teknis Ekonomis

Pendidikan adalah bukan sekadar alat untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembangunan ekonomi. Dalam praktik manajemen pendidikan kontemporer, salah satu fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, baik pada tingkat individu maupun global. Fungsi teknis ekonomi mengacu pada kontribusi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi. Misalnya, pendidikan membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan bersaing secara kompetitif. Secara faktual bahwa orang yang berpendidikan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan orang yang memiliki pendidikan menjadi lebih produktif dari pada orang yang tidak memiliki pendidikan. Produktivitas manusia didasarkan pada keterampilan yang di dapat melalui pendidikan.

b) Nilai Balik Pendidikan

Investasi di bidang pendidikan menghasilkan pengembalian nilai yang lebih tinggi dan lebih baik dari pada investasi di bidang infrastruktur. Pengembalian investasi pendidikan berupa nilai-nilai yang dapat terukur indikator keberhasilannya. Nilai yang diperoleh pendidikan adalah total biaya pendanaan pendidikan dibandingkan dengan total pendapatan yang diperoleh setelah lulus dan setelah masuk ke dunia kerja.

c) Fungsi Non Ekonomi

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi, setidaknya terdapat tiga fungsi non-ekonomis, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial kemanusiaan, mengacu pada kontribusi pendidikan untuk pembangunan manusia dan hubungan sosial pada tingkat sosial yang berbeda. Misalnya, pada tingkat individu, pendidikan membantu siswa berkembang secara sosial, fisik, psikologis, dan intelektual dengan maksimal.

Fungsi politik, mengacu pada pendidikan berkontribusi terhadap pembangunan politik di berbagai tingkatan masyarakat. Misalnya, pendidikan membekali siswa dengan sikap kewarganegaraan yang positif dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi lebih dimungkinkannya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab, wawasan, dan perilaku yang lebih demokratis.

Fungsi budaya, mengacu pada kontribusi pendidikan untuk transisi dan pengembangan budaya di berbagai tingkat sosial. Misalnya, pendidikan membantu siswa mengembangkan kreativitas, kesadaran estetika, norma, nilai, keyakinan, dan sikap sosial yang baik. Masyarakat terdidik diharapkan lebih mampu memahami dan menghargai perbedaan dan keragaman budaya, sehingga lebih terbuka terhadap keragaman budaya. Diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin mudah untuk beradaptasi dengan budaya yang mengarah pada integrasi budaya daeran dan nasional.

Fungsi pendidikan, mengacu pada kontribusi pendidikan untuk pengembangan dan pemeliharaan di berbagai tingkat sosial. Misalnya, pendidikan membantu siswa dalam belajar dan membantu guru bagaimana cara guru mengajar yang baik. Orang terpelajar diharapkan memiliki kesadaran belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*), selalu merasa jauh dari informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta terdorong untuk maju serta terus belajar.

Menurut Slamet (2015, p.7) investasi pada umumnya terjadi dalam dua bentuk, yaitu; 1) investasi langsung (*direct investment*) yaitu investasi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat berupa barang, seperti membeli tanah, emas, atau membeli real estate/ruko, menjalankan aktivitas usaha dengan membuat badan usaha. 2) Investasi tidak langsung (*indirect investment*) yaitu melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat langsung, hanya dengan menjadi pemegang saham atau obligasi saja dan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan investasi; biasanya menggunakan perantara (*agent*), dan agen tersebut akan mendapatkan keuntungan (*fee*). Salah satu contoh bentuk investasi tidak langsung yang populer adalah investasi di pasar modal, seperti kepemilikan saham, obligasi, surat berharga, dan sebagainya.

3. Melakukan Reformasi pendidikan

Reformasi pendidikan merupakan upaya untuk memperbaiki sektor pendidikan (Siregar, 2021, p.125; Minhaji, 2018, p.25;). Reformasi pendidikan memiliki dua

karakteristik dasar, yaitu programatik dan sistematis. Reformasi pendidikan mengacu pada kurikulum atau program suatu lembaga pendidikan. Reformasi program pada suatu lembaga mencakup inovasi dalam bidang pendidikan.

Menurut Khabibullah (2016) reformasi pendidikan adalah tentang melakukan perubahan dengan memperhatikan kebutuhan masa depan, mempertahankan bentuk asli, menghentikan penyimpangan dan praktik yang salah, dan memperkenalkan prosedur yang lebih baik dari sebelumnya dengan merombak sistem secara total dengan paradigma pendidikan yang baru. Pemerintah berusaha untuk melakukan reformasi pendidikan dengan harapan terjadinya perubahan yang lebih baik pada kualitas pendidikan di Indonesia. Bukti adanya reformasi pendidikan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengusulkan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN dan juga dibentuknya program-program pendidikan dan pelatihan serta peluang beasiswa bagi masyarakat.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2022, pemerintah akan melanjutkan program reformasi sektor pendidikan melalui skema belajar merdeka. Salah satunya adalah terkait peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan mendorong Program Guru Penggerak sebanyak 22.411 orang guru, Organisasi Masyarakat Penggerak sebanyak 5.122 orang ataupun Dukungan Sekolah Penggerak sebanyak 2.500 sekolah.

Selain itu, pemerintah juga tetap mengutamakan program prioritas yaitu, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Tunjangan Guru non-ASN, Tunjangan Sertifikasi Guru dan Dosen, Asesmen Kompetensi Minimum, Sekolah dan Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, SMK-PK, Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) untuk bidang Vokasi. Pada realisasi anggaran pendidikan tahun 2022 sebesar Rp541,7 triliun, Pemerintah Pusat menetapkan belanja sebesar Rp181.714,3 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Pada tahun 2022, jumlah siswa penerima BOS melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ditargetkan dapat menjangkau sampai 54 juta siswa. Sedangkan bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dikdasmen ditargetkan dapat menjangkau kepada 20,2 juta siswa dan penerima program bidikmisi/KIP Kuliah ditargetkan menjangkau 650,6 ribu orang. Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam komitmen untuk melakukan reformasi pendidikan. Bentuk reformasi pendidikan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengalokasikan 20 persen dari APBN pada tahun 2022 untuk pembiayaan semua kegiatan di bidang pendidikan. Harapan terbesar dari pemerintah tentu terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan sehat sehingga *output* yang diinginkan adalah naiknya indeks ataupun taraf hidup masyarakat serta adanya perubahan perilaku.

4. Memperkuat Peran LPDP

Penyelenggaraan pendidikan tentu sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Dana tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang intinya dijelaskan bahwa kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan serta pemerintah dalam pendidikan dan anggaran pendidikan nasional. Hal ini berarti ada

tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam memenuhi pembiayaan pendidikan bagi warga negara Indonesia.

Pada tahun 2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat putusan berupa PMK Nomor 252 Tahun 2010 tentang satuan kerja yang beri wewenang untuk mengelola dana pendidikan. Satuan kerja tersebut kemudian dikenal dengan istilah LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di Indonesia. Kemudian pada tahun 2012, lembaga tersebut tidak lagi menjadi satuan kerja, namun berubah nama menjadi Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perubahan tersebut sesuai putusan PMK Nomor 18 tahun 2012. LPDP diberi wewenang penuh untuk mengelola beasiswa, dana riset, dan dana investasi.

Beasiswa Pendidikan Indonesia adalah program layanan LPDP yang memiliki tujuan untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia Indonesia diharapkan mempunyai kualitas dan berpendidikan serta memiliki semangat kepemimpinan yang tinggi. Kepemimpinan yang mempunyai visi untuk membangun bangsa dan sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Komitmen LPDP tersebut dibuktikan dengan pemberian bantuan pendanaan pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat. Termasuk masyarakat yang menempuh studi lanjut pada program magister atau program doktor di perguruan tinggi unggulan, baik di dalam maupun di luar negeri bagi yang memenuhi kriteria ataupun kualifikasi yang distandarkan LPDP.

Pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp20.000,0 miliar melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola sebagai Dana Abadi Pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tujuan pengalokasian DPPN untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi masyarakat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dalam bentuk beasiswa dan riset. Pada tahun 2022, Pemerintah berkomitmen memperkuat peran LPDP sebagai *Endowment Fund (EF)* untuk mendorong persebaran program beasiswa dan pendanaan riset. LPDP juga akan berinvestasi pada berbagai bidang ataupun instrumen guna mendapatkan nilai tambah dengan risiko yang terukur. Nilai tambah berupa imbalan hasil yang diharapkan sepanjang tahun 2022 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp3.631,2 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mendanai program beasiswa bagi mahasiswa baru sebanyak 8.600 orang dan bagi mahasiswa yang masih menempuh pendidikan sebanyak 20.090 orang.

Pengelolaan dan penyaluran beasiswa untuk masyarakat yang dikelola oleh LPDP diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pendanaan pendidikan di Indonesia. Posisi LPDP harus didukung dan diperkuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, terkait pengelolaan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Demikian juga dengan masyarakat penerima beasiswa di semua tingkat pendidikan harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan masa studi sesuai yang dipersyaratkan oleh LPDP dengan batas waktu maksimal. Semakin besar realisasi ataupun penyerapan APBN yang telah disetujui, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah dalam penyaluran dan pengelolaan dana pendidikan oleh LPDP.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi dalam investasi pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan memperbaiki agar terjadi perubahan peningkatan taraf hidup manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, terkait dengan nilai-nilai dan fungsi ekonomi. Investasi pendidikan juga bertujuan agar terjadi perubahan pola pikir dalam kehidupan terkait pembangunan SDM. Pembangunan SDM merupakan salah satu investasi pendidikan yang memiliki keuntungan tidak secara langsung dirasakan, namun dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang. Pemerintah telah melakukan investasi pendidikan melalui kebijakan dan menetapkan anggaran sebesar 20 persen dari APBN dan APBD pada tahun 2022. Bentuk realisasi dari anggaran tersebut adalah dibentuknya program pendidikan dan pelatihan serta penyaluran program beasiswa bagi masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di semua tingkatan dengan memperkuat LPDP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Aswas, M. Oos. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta. Bandung.
- Burhanuddin, Afid. (2013). Keterkaitan Pendidikan dan Pembangunan. Diakses pada web: <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/11/27/keterkaitan-pendidikan-dan-pembangunan/>
- Chapra, M. Umer (1993). *Islam and Economic Development*. Islamabad, IRTI-IDB. Pakistan.
- Domino, Primus. (2018). Investasi dalam Bidang Pendidikan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Volume 2, Nomor 1 Januari 2018*.
- Fahmi, Irhman. (2015). *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Manusia*. Makassar: De La Macca.
- Irianto, H. A. (2011). *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, Jakarta: Kencana.

- Jokowi. (2021). Pemerintah Berkomitmen Perkuat Investasi di Bidang Pendidikan. Diakses pada web: <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/pemerintah--berkomitmen-perkuat-investasi-di-bidang-pendidikan>
- Khabibullah, Muttaqin. (2016). Konsep Reformasi Pendidikan Islam. Diakses pada web: <http://muttaqinhabibullah.blogspot.com/2016/04/konsep-reformasi-pendidikan-islam.html>
- Khotami, Wildani. (2019). Ekonomi Pembnagunan. Banjarmasin: Akademi Maritim Nusantara.
- Kuncoro, Mudrajat (2010). Dasar- dasar Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Machali, Imam, en Ara, Hidayat. (2015). *The Handbook of Education Management Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Yogyakarta: Magister Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahat, H. and S. Idrus. (2016). Education for Sustainable Development in Malaysia: A Study of Teacher and Student Awareness. *Malaysia Journal of Society and Space* Volume No. 12 Issue (6). Pg: 77 – 88.
- Mahri, Jajang W.. Dkk. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Marshall, G. R., D. W. Hine, and M. J. East. (2017). Can Community-Based Governance Strengthen Citizenship in Support of Climate Change Adaptation? Testing insights from Self-Determination Theory. *Environmental Science and Policy*, Vol. 72. Pg. 1 – 9.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook: Third Edition*. Arizona: SAGE Publications. Inc.
- Minhaji, Abdul Muis. (2018). Otonomi dan Reformasi Pendidikan. *Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam* | Juli. ISSN: 225-8164 | 2018. edupedia Vol. 3, No. 1, Juli 2018.
- Nugraheni, Hastin Riva dan Ninik Sudarwati. (2022). Kontribusi Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 6, Nomor 1, Juni 2021 E-ISSN 2722-3353*.
- Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (didownload dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4862>)

- Perkasa, Riphoo Delzy. (2017). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia: Investasi Pendidikan sebagai Peningkatan Daya Saing Bangsa. Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*. Volume II Nomor 01, Mei – Oktober 2017, p. 62 – 71 ISSN: 2503-1503 (Online) <https://ojs.fkipummy.ac.id/index.php/jusie>.
- Rivai, Veithzal dan Murni Sylviana. (2009), *Education Management Analisis Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, Umberto. (2003). *Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta
- Simanjuntak, Familia Novita. (2017). *Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. (didownload dari: <http://repository.uki.ac.id/3213/>)
- Siregar, Epi Supriyani. (2021). Dampak Reformasi Pendidikan Indonesia di Abad 21. *Jurnal Guru Kita*. Vol. 5 No. 4 September 2021. P-ISSN: 2548-883X | e-ISSN: 2549-1288.
- Slamet, A. (2006). “Investasi Pendidikan sebagai Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN 1410-4946, Volume 10, Nomor 1, Juli (71 - 89) Jurusan Ekonomi FIS Universitas Negeri Semarang.
- Suryadi, A. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*, 12th Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (didownload dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>)
- Yusuf, Ramli. (2019). Pendidikan Investasi Sdm dan Masa Depan Pembangunan Bangsa. *Foramadiahi*, Vol.10. No1.Edisi Juni 2019